

## MERUMUSKAN GRAND STRATEGY

-andi widjajanto-

- Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- Untuk konteks Indonesia, upaya untuk mengembangkan sistem pertahanan negara harus memperhatikan faktor geostrategis negara baik ke dalam dan ke luar. Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuat kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kredibel yang didasarkan atas konsep unified approach dan suatu strategi komprehensif yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Faktor geostrategis ke luar mengharuskan pembuat kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang kuat, paling tidak melalui pengembangan kemampuan diplomasi, pengintaian dan sistem peringatan dini.
- Sistem pertahanan negara harus dapat secara optimal digelar dalam berbagai bentuk operasi militer untuk memenangkan perang. Strategi pertahanan Indonesia mengenal tiga jenis perang: perang umum, perang terbatas, dan perang revolusioner.
- Perang umum dirumuskan sebagai agresi terbuka pihak musuh dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menduduki sebagian atau seluruh wilayah nasional Indonesia. Perang terbatas adalah serangan terbatas negara asing terhadap suatu bagian tertentu dari wilayah nasional dengan menggunakan kekuatan militer terbatas dan tujuan terbatas. Perang revolusioner dianggap sebagai bentuk ancaman yang dikembagkan secara konsepsional oleh pihak yang bermusuhan dengan tujuan untuk mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 menjadi negara yang berdasarkan konstelasi ideologi lain dengan menggunakan subversi, teror dan pengacauan yang bisa menjadi pemberontakan menggulingkan pemerintahan yang sah.
- Upaya pemenangan perang tersebut harus menjadi bagian eksplisit dari sistem pertahanan negara yang dirumuskan oleh Departemen Pertahanan dengan mengacu pada UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Perumusan sistem pertahanan negara ini tertuang dalam bentuk Buku Putih Pertahanan, Kajian Pertahanan Strategis, Perencanaan Strategis Pertahanan, Program Pengembangan Kekuatan, dan Anggaran Pertahanan.
- Buku Putih Pertahanan bukan saja berfungsi untuk perencanaan pertahanan nasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun saling pengertian antarnegara (*Confidence Building Measures/CBMs*) dan sikap saling percaya (*Trust Building Measures/TBMs*) demi terwujudnya sebuah tatanan regional dan global yang stabil dan damai. Kajian Strategis Pertahanan mengkaji perkembangan lingkungan politik dan keamanan regional dan global, serta tuntutan untuk pengembangan kemampuan TNI untuk mengatasinya. Perencanaan Strategis (RENSTRA) memuat perencanaan pertahanan jangka panjang untuk pengembangan

kemampuan TNI dalam kurun waktu tertentu disesuaikan dengan anggaran negara. Perencanaan Pertahanan ini dibuat untuk menghadapi ancaman dan perubahan lingkungan strategis. Program Pengembangan Kekuatan merupakan rencana modernisasi pertahanan jangka menengah yang akan dilakukan oleh Departemen Pertahanan berdasarkan asupan dari kebutuhan pertahanan masing-masing angkatan. Program pengembangan kekuatan ini kemudian dioperasionalkan dalam bentuk anggaran pertahanan yang dirancang setiap tahun dan disusun oleh Departemen Pertahanan berkonsultasi dengan Departemen Keuangan dan DPR.

- Hasil yang diharapkan muncul dari penerapan sistem pertahanan negara adalah Strategi Pertahanan Nasional Indonesia (*Grand Strategy*) untuk masa perang dan masa damai. *Grand Strategy* ini akan berisi: (1) penilaian potensi bentuk dan eskalasi konflik antar negara, internal, dan transnasional; (2) penilaian potensi ancaman (*threat assesement*); dan (3) penilaian kapabilitas pertahanan (*capability assesement*) yang harus dikembangkan Indonesia. Saat melakukan penilaian potensi ancaman, Departemen Pertahanan harus memiliki data yang akurat tidak hanya tentang kekuatan militer yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Timur-Tenggara dan negara-negara besar (*great powers*) tetapi juga tentang ada tidaknya intensi dari negara-negara tersebut untuk menyerang Indonesia. Saat melakukan penilaian kapabilitas pertahanan, Departemen Pertahanan harus mengetahui dengan komprehensif *revolutions in military affairs* (RMA) yang menyangkut tidak hanya perkembangan terkini teknologi militer namun juga perkembangan strategi dan doktrin militer global.
- Berdasarkan penilaian tersebut, Departemen Pertahanan merancang pengembangan postur pertahanan Indonesia, akuisisi persenjataan yang diperlukan, dan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Rancangan ini memerlukan perhitungan yang rumit karena harus mengkombinasikan alokasi sumber daya nasional yang diperlukan untuk mempertahankan postur pertahanan yang saat ini ada (*arms maintenance*) dan kebutuhan untuk memulai proses modernisasi (*arms build-up*). Program *arms maintenance* perlu dilakukan saat ini juga untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan kapabilitas militer antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Sementara program *arms build-up* perlu dilakukan dalam kerangka *confidence building-measure* untuk mencegah terjadinya *mispersepsi* dari negara-negara tetangga yang dapat mengarah ke perlombaan senjata (*arms race*) di kawasan.
- Pengembangan struktur kekuatan militer baru harus disertai dengan proses pembangunan institusi yang didalamnya diatur jelas prosedur dan mekanisme pembuatan kebijakan politik. Dalam institusi tersebut, pertimbangan politik harus menjadi dasar bagi semua kebijakan keamanan. Rencana program pengembangan struktur kekuatan militer baru ini dapat dilakukan jika ada (1) audit komprehensif tentang kapasitas militer yang ada saat ini; (2) proyeksi dan kriteria kapabilitas militer yang ingin dikembangkan; dan (3) kerangka revisi organisasi TNI yang dapat mewadahi struktur kekuatan militer baru.\*\*\*